

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul skripsi ini terlebih dahulu akan penulis kemukakan pembatasan istilah judul sebagai berikut:

1. Pendidikan Politik

Pendidikan atau tarbiyah adalah aktivitas yang dilandasi satu kesadaran untuk melakukan perubahan pada diri seseorang.¹ Pendidikan juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang disampaikan secara bertahap oleh pendidik secara berkesinambungan baik dalam kehidupan individu maupun keseluruhan untuk mencapai kemaslahatan umat.²

Politik menurut arti harfiah (bahasa) berasal dari kata Yunani "polistiaia", "polis" berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri (Negara).³ Adapun Politik dalam bahasa Arab diambil dari kata "saa-saa", bentuk *fa'ilnya* adalah "saa-is" dengan bentuk *masdarnya* adalah "siyasah" yang berarti pemeliharaan. Dengan

¹ Perubahan yang dimaksud berkaitan dengan perilaku pribadi (*suluk fardī*) dan juga perilaku kolektif (*suluk jama'ī*). Sehingga tumbuh keseimbangan yang menjadikan kemanusiaannya terbentuk secara utuh. Pendidikan ini bersifat komprehensif, menjangkau seluruh dimensi hidup manusia, meliputi aspek jasmani, ruhani, dan 'aqli, dan harus dilakukan secara berkelanjutan hingga kemanusiaannya tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Lihat, Abu Ridha, *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*, (Bandung: Syamil, 2002), hal.30.

² Najib Khalid Al 'Amir, *Tarbiyah Rasulullah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 22

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal. 8.

ssdemikian politik dapat diartikan memelihara atau memperhatikan urusan umat.⁴

Sementara Utsman Abdul Mu'iz Ruslan mengemukakan pendidikan politik sebagai berikut:

Upaya sungguh-sungguh yang dilakukan lembaga dan agen pendidikan resmi atau tidak resmi untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian siasah seseorang atau warga sesuai dengan *tsaqofah* (budaya Politik) lembaga-lembaga itu. Tarbiyah siyasiah berusaha membentuk dan mengembangkan seluruh tingkat kesadaran siasah agar setiap warga memiliki kesadaran dan kemampuan sendiri, serta membentuk dan mengembangkan potensi *musyarakah siyasiah* (partisipasi politik) masyarakat.⁵

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat PKS adalah organisasi politik yang mempunyai legalitas dalam ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. PKS merupakan partai politik berasas Islam sebagai partai peserta pemilu yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum.

3. Studi Kasus

Menurut arti bahasa studi adalah pendidikan, pelajaran dan penyelidikan.⁶ Adapun yang dimaksud dalam penulisan ini adalah

⁴ Muh. Abduh Qodir Abu faris, *Fiqih Politik Hasan Al-Banna*, terj. Odie Al-Faeda, (Solo, Media Insani Press, 2003), hal.16

⁵ Abu Ridha, *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*, (Bandung: Syamil, 2002), hal 46

⁶ Puis A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 728.

penyelidikan dan pengkajian terhadap suatu konsep pendidikan politik dengan kasus pada suatu daerah atau tempat.

4. Dewan Pimpinan Cabang PKS Mantrijeron Kota Yogyakarta

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah struktur kepengurusan partai Keadilan Sejahtera di tingkat kecamatan. Mantrijeron adalah nama wilayah pemerintahan tingkat kecamatan. Di kota Yogyakarta, Kecamatan Mantrijeron merupakan satu dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada. Adapun Kota Yogyakarta merupakan wilayah pemerintahan setingkat dengan kabupaten yang menunjukkan alamat secara lengkap dari DPC PKS Mantrijeron itu berada.

Dari penegasan istilah diatas, yang dimaksud dengan judul tersebut adalah suatu kajian ilmiah dengan studi lapangan mengenai konsep pendidikan politik Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang berasas Islam, dengan studi kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Mantrijeron Kota Yogyakarta, untuk membentuk pribadi muslim menjadi pemimpin yang ideal.

B. Latar Belakang Masalah

Politik dalam pandangan awam dianggap dunia yang kotor, penuh intrik dan hanya berorientasi pada kepentingan pribadi dan cenderung membuat seseorang lebih pragmatis dan oportunistis. Perjuangan

kekuasaan (*power struggle*) sebagai inti dari politik biasanya dianggap mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.⁷ Namun dalam kenyataannya kekuasaan seringkali dijadikan "kuda tunggangan" untuk kepentingan kelompok dan partainya sendiri. Permasalahan lain bahwa para politisi bukan hanya melakukan praktek politik yang kotor ketika berkompetisi dengan partai atau kelompok oposisi, namun lawan politikpun bisa muncul justru dari tubuh partai itu sendiri sehingga terjadilah konflik internal partai.

Di sisi lain pemerintah yang berkuasa menjelma menjadi suatu kasta kepemimpinan yang terisolir dari masyarakat, yang secara lihai mendominasi massa yang papa.⁸ Pemerintah dalam berbagai kedudukan tersebut baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif seringkali menjadi elit politik yang dengan kekuasaannya sengaja melakukan pelanggaran hukum hasil rancangannya sendiri.⁹ Keji dan kotor nampaknya menjadi pilihan kata yang dianggap lebih tepat oleh masyarakat untuk menyebut dunia

⁷ Miriam Budiardjo, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal. 10. Adapun Paulo Freire memandang kekuasaan sebagai kekuatan yang negatif dan juga positif; sifatnya dialektis tetapi *mode of operation*-nya selalu represif. Kekuasaan selalu diikuti dengan pertentangan, ketegangan dan kontradiksi dalam berbagai institusi sosial. Lihat, Paulo Freire, "*Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan pembebasan*", terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002) hal. 17.

⁸ Robert Michels menegaskan bahwa adanya pembagian kerja yang diperlukan menyebabkan beberapa orang memperoleh kecakapan memimpin, sedangkan yang lain tidak memperoleh ini sehingga selalu menjadi obyek yang harus dipimpin. Teoritis yang lain, Vilfredo Pareto, menyatakan hal ini timbul akibat ketidaksamaan kualitas pembawaan atau bakat pribadi. Sementara beberapa teoritis akhir-akhir ini seperti Suzanne Keller, menyatakan bahwa penguasaan atau pemerintahan oleh elit merupakan syarat yang harus dipenuhi jika masyarakat ingin tetap terintegrasi. Lihat, Mohtar Mas'ood dan Colin McAndrews, "*Perbandingan Sistem Politik*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993) Hal. 79-80.

⁹ Berbagai pelanggaran hukum tersebut dapat dilihat seperti yang terjadi di Yogyakarta, dari catatan Pusat Informasi Kompas (PIK) selama tahun 2004 tercatat adanya pejabat publik yang korupsi sebanyak 155 kali. KOMPAS, dalam catatan akhir tahun bidang sosial "*Tiga Virus Berjangkit di DIY*", edisi; Selasa, 28 Desember 2004.

politik. Konsekuensi logisnya, masyarakat memandang bahwa pembaharuan dunia politik dengan apapun namanya hanya sekedar menjadi wacana yang utopis.

Di tengah fenomena percaturan politik tersebut, sebagian orang menaruh harapan pada sebuah partai yang menamakan diri Partai Keadilan Sejahtera. Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai penjelmaan dari Partai Keadilan (PK) yang dideklarasikan pada masa awal reformasi ini mengusung misi besar untuk sebuah perbaikan negeri. Semua partai politik memang mempunyai misi dan jargon yang sama untuk perbaikan, namun sebagian kalangan mengakui ada sebuah kongruen antara misi perbaikan dan unsur-unsur pendukung terbentuknya misi tersebut dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sesuatu yang dimaklumi bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh dan merupakan sistem hidup yang lengkap.¹⁰ Islam tidak memisahkan antara urusan peribadatan kepada Allah dengan berbagai problematika kehidupan di dunia, dan rumusan pemikiran itu selalu mengalami kemajuan.¹¹ Termasuk dalam hal ini adalah Politik yang sering diidentikkan dengan sesuatu yang kotor, keji dan tidak bermoral. Kondisi seburuk apapun yang terjadi dalam suatu pemerintahan, namun tetap saja politik tidak bisa tergeser dari arti yang mulia jika dijalankan secara bersih dan sarat nilai.

¹⁰ Sa'id Hawa, *Membina Angkatan Mujahid*, (Solo: Intermedia, 2002), hal. 33

¹¹ Abdul Munir Mul Khan, *"Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi kebudayaan dalam dakwah Islam"*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1994), hal. 16.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang berasas Islam, oleh karena itu dalam aktivitas politiknya menunjukkan ciri keislaman. Kehadiran PKS di tengah fenomena politik Indonesia yang carut marut telah mampu memberi nuansa baru yang tidak bisa di temui pada partai politik lainnya. Soliditas kader partai nampak sebagai ciri khas partai yang jauh dari konflik internal. Keterbatasan dana juga tidak menjadi penghalang bagi partai tersebut untuk mampu membentuk struktur partai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat hingga tingkat Dewan Pimpinan Ranting.

DPC PKS Mantrijeron kota Yogyakarta sebagai struktur partai di tingkat kecamatan merupakan salah satu dari 14 DPC PKS di seluruh Kota Yogyakarta yang terbentuk secara solid. Pendidikan politik sebagai agenda besar dari DPC PKS Mantrijeron telah berjalan dengan baik untuk turut mencetak kader yang berkepribadian muslim. Dewan Pimpinan Cabang PKS Mantrijeron berusaha menepis penilaian negatif masyarakat terhadap politik. Hal itu dilakukan dengan proses pendidikan politik yang diharapkan akan mampu mencetak kader partai dan pemimpin yang mempunyai kepribadian muslim yang baik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dan yang akan ditulis dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Konsep Pendidikan Politik DPC PKS Mantrijeron dalam membentuk pribadi-pribadi pemimpin yang menjalankan politik secara ideal.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang konsep Pendidikan politik DPC PKS Mantrijeron dalam membentuk pribadi muslim sebagai pemimpin yang berpolitik secara ideal.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan dalam upaya memperkaya khasanah pemikiran Islam pada masalah pendidikan politik
- b. Untuk menambah khasanah/wacana pendidikan politik guna penciptaan sistem kehidupan yang demokratis
- c. Sebagai sumbangan informasi untuk penelitian yang lebih mendalam tentang pendidikan politik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian dengan mengambil data di Dewan Pimpinan Cabang PKS Mantrijeron.

2. Sumber data

Di samping menggunakan data dari lapangan sebagai data primer, penulis juga mengambil sumber utama data dari buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi, di antaranya: *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslimin Indonesia kontemporer*, penulis Aay Muhammad furon, dan diterbitkan oleh Teraju, Jakarta, 2004. *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*, ditulis oleh Tim Departemen Kaderisasi DPP PK Sejahtera, buku ini diterbitkan oleh PT. Syaamil Cipta Media, Bandung, 2004.

Sebagai data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan atau mendukung terhadap pokok pembahasan tersebut¹² diantaranya adalah: *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*, yang ditulis oleh Abu Ridha, diterbitkan oleh Syamil, Bandung, 2002. Kemudian karya Dr. Muhammad Abdul Qodir Abu Faris dengan

¹² Ibid hal. 83

judul aslinya *Fiqhu As-siyasy 'inda Al-Imam Hasan Al-Banna* dan diterjemahkan *Fiqih Politik Hasan Al-Banna*. Buku ini diterbitkan Media Insani Press, Solo, 2003, dan sumber yang lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data tersebut langkah pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

a. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan menyelidiki sumber-sumber data berupa benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah-majalah ilmiah, dan sebagainya.¹³ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen kegiatan DPC PKS Mantrijeron.

b. Metode Wawancara

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti.¹⁴ Wawancara dilakukan kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang PKS Mantrijeron untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renske Cipta, 1993), hal. 148.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 64.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian atas data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti jauh lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi, hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk uraian naratif.¹⁵ Dalam analisis kualitatif ini penulis mendeskripsikan tentang konsep pendidikan politik DPC PKS Mantrijeron dalam membentuk pribadi pemimpin yang menjalankan politik secara ideal.

F. Telaah Pustaka

Kajian tentang pendidikan politik telah banyak dijumpai, baik dalam bentuk buku-buku, makalah, artikel di surat kabar ataupun media yang lainnya. Namun kajian yang secara khusus membahas tentang pendidikan politik yang diterapkan oleh sebuah partai, dan dalam kajian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum banyak dikaji, namun demikian ada beberapa buku yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan tema yang akan penulis angkat dalam skripsi ini, yang nantinya dapat penulis jadikan bahan pustaka dalam penyusunan skripsi. Buku-buku tersebut diantaranya :

Laporan penelitian yang di tulis oleh Drs. Chumaidi Syarief Romas, M.si. judul penelitian: *Relasi Agama dan Negara Perspektif Partai*

¹⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal. 39

Keadilan Sejahtera Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang PKS sebagai partai dakwah serta fenomena pengkaderan PKS yang berstrata. Ditulis juga dalam penelitian ini tentang pandangan PKS terhadap agama Islam yang dikatakan syamil (menyeluruh) serta negara sebagai bentuk pemerintahan yang dalam undang-undangnya harus terwarnai oleh nilai-nilai keislaman. Terakhir penulis menjabarkan relasi agama dengan negara yang dinilai oleh PKS sebagai sebuah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan dalam tatanan kehidupan untuk mensejahterakan manusia. Aay Muhamad furon, *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslimin Indonesia kontemporer*, dalam buku ini penulis mengupas tentang pemikiran Hasan Al-banna terhadap permasalahan politik dan kenegaraan. Hasan Al-banna menyatakan bahwa seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia seorang politisi, memiliki jangkauan pandangan yang jauh ke depan dan mempunyai kepedulian yang besar terhadap kepentingan umat. Berbagai pemikiran Hasan Al-banna itu yang kemudian oleh PKS direfleksikan dalam gerakan partai politik yang sekaligus disebut sebagai partai dakwah dan partai kader.

Departemen Kaderisasi DPP Partai Keadilan Sejahtera, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera*, Dalam buku ini Departemen kaderisasi merumuskan tentang profil kader PKS pada tahun 2009. penulis menggambarkan profil kader Ideal yang kokoh dan mandiri, Dinamis dan

kreatif, Spesialis dan berwawasan global, Murobbi produktif, Beramal jama'I, Pelopor perubahan, serta mempunyai ketokohan sosial.

Abu Ridha, *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*, dalam buku ini dipaparkan tentang pentingnya pendidikan politik. Bahwa pendidikan politik diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran politik (*al-wa'yu al-siyasi*) dan partisipasi politik (*musyarakah siyasiyah*).¹⁶ dipaparkan pula hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik yang akan kehilangan maknanya ketika hilang salah satu unsurnya.¹⁷ Di bagian akhir buku ini Abu Ridho menjelaskan tentang institusi yang terkait dengan pendidikan politik dalam Islam, salah satu institusi terkecilnya adalah keluarga.¹⁸

G. Kerangka Teoritik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan sebuah proses pendidikan politik yang ditujukan kepada masyarakat dan juga kader partai. Pendidikan politik yang ditujukan kepada masyarakat dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat supaya tercipta iklim politik yang partisipatoris. Sementara pendidikan politik yang ditujukan kepada kader partai merupakan upaya untuk mempersiapkan dan membekali calon-calon pemimpin bangsa yang akan mengemban amanah kepemimpinan.

¹⁶ Abu Ridha, *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*, (Bandung: Syamil, 2002), hal.7

¹⁷ Ibid. hal. 33

¹⁸ Ibid. hal. 62

Kekuasaan merupakan amanah dan tugas manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi yang harus dipegang oleh orang-orang yang mempunyai misi perbaikan. Sementara ketika kekuasaan itu berada di tangan elit politik yang berorientasi keduniaan semata, umat Islam wajib menyelamatkan kekuasaan tersebut. Atas dasar itulah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa perlu untuk ambil bagian dalam politik dan proses peralihan kekuasaan. Kekuasaan yang hendak diraih tersebut harus dimaknai sebagai sebuah amanah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT. Orientasi politik sebagai bagian dari ibadah ini akan terwujud ketika aktivis partai dibekali dengan pendidikan politik yang sarat nilai.

Dewan Pimpinan Cabang PKS Mantrijeron sebagai struktur partai di tingkat kecamatan melakukan serangkaian pendidikan politik bagi kader partai. Pendidikan politik ini dijalankan oleh struktur partai yang terdiri dari beberapa seksi bidang dan masing-masing melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program kerjanya. Proses pendidikan politik DPC PKS Mantrijeron ini merupakan penjabaran dalam bentuk kerja dari konsep pendidikan Politik DPC PKS Mantrijeron.

Dalam konsep pendidikan politik DPC PKS Mantrijeron diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bagian pendidikan yang meliputi

- 1). Pembinaan kader
- 2). Pendidikan Politik
- 3). Politik Aplikatif

Ketiga bagian dari pendidikan politik diatas merupakan satu kesatuan dari serangkaian proses pendidikan politik. Bahwa pendidikan politik dalam membentuk pribadi muslim yang menjalankan politik secara ideal akan bisa terwujud dengan adanya keseimbangan dari tiga bagian tersebut. Klasifikasi ini didasarkan pada sasaran dan target dari masing-masing bagian. Pembinaan kader dengan target terbentuknya kader yang memiliki keshalehan secara individu. Pendidikan politik mempunyai target untuk membekali kader dengan wawasan politik kenegaraan serta problematika dalam pemerintahan. Sementara Politik aplikatif diarahkan untuk membentuk kader partai yang mampu berinteraksi dan untuk selanjutnya dapat menyerap aspirasi dari masyarakat.

Dalam mekanisme kerja Struktur DPC PKS Mantrijeron dibagi dalam 3 seksi, yaitu :

- 1). Seksi pembinaan kader
- 2). Seksi opini dan aksi
- 3). Seksi kesejahteraan rakyat

Untuk selanjutnya ketiga seksi ini bekerja untuk tugas struktur kepartaian termasuk dalam melaksanakan pendidikan politik DPC PKS Mantrijeron. Proses pendidikan politik yang secara teknis dilaksanakan oleh 3 (tiga) seksi ini, masing-masing memberi kontribusi tersendiri dalam proses pendidikan politik. Dengan demikian proses pendidikan politik ini dijalankan secara bersamaan oleh 3 (tiga) seksi.

Seksi pembinaan kader secara intensif melakukan serangkaian agenda kegiatan untuk menjadikan kader sebagai pribadi yang shaleh. Agenda besar seksi pembinaan kader ini adalah membina kader partai melalui Kajian Rutin Kader (TRK) atau yang biasa disebut *Liqo'*. Proses pendidikan yang dilakukan oleh seksi pembinaan kader ini lebih bersifat personal.

Pendidikan politik untuk membekali kader dengan wawasan politik kenegaraan menjadi tanggung jawab dari Seksi opini dan aksi. Sementara seksi kesejahteraan berugas merancang dan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan kegiatan sosial kemasyarakatan ini diharapkan kader akan mempunyai kepedulian dan dapat menyerap aspirasi masyarakat.

Proses pendidikan politik yang saling melengkapi dari masing-masing seksi merupakan upaya dalam membentuk kader partai yang dapat memahami Islam secara utuh. Pemahaman yang utuh dan menyeluruh tersebut untuk selanjutnya mendorong terwujudnya pribadi muslim yang secara ideal dapat menjalankan politik untuk kesejahteraan umat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh dan sistematis, maka Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu, berisi penegasan istilah, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis mendeskripsikan sejarah kelahiran Partai Keadilan Sejahtera dan lebih khusus DPC PKS Mantrijeron. Dalam bab ini pula digambarkan secara rinci tentang gambaran dari DPC PKS Mantrijeron yang meliputi struktur kepengurusan serta aspek-aspek yang mendukung proses pendidikan politik.

Bab tiga, membahas hasil penelitian tentang konsep pendidikan politik DPC PKS Mantrijeron. Bagaimana konsep pendidikan politik tersebut dalam membentuk pribadi muslim yang ideal dalam menjalankan politik

Bab empat, merupakan akhir pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang konsep pendidikan politik Dewan Pimpinan Cabang PKS Mantrijeron dalam membentuk pribadi-pribadi pemimpin muslim yang dapat menjalankan politik secara ideal penulis dapat menyimpulkan :

Konsep pendidikan politik Dewan Pimpinan Cabang PKS Mantrijeron yang secara kurikulum mengikuti ketetapan Dewan Pimpinan Pusat, dan secara aplikatif menggunakan metode dan strategi tersendiri telah cukup efektif dalam upaya pembentukan pribadi-pribadi pemimpin yang akan menjalankan politik secara ideal. Kepribadian yang terbentuk dari proses pendidikan politik tersebut adalah kepribadian muslim yang mampu mewarnai akhlak kader partai sebagai peserta didik untuk tidak berorientasi kekuasaan semata dalam berpolitik. Namun demikian *out put* dari proses pendidikan politik tersebut belum banyak nampak dari para kader PKS Mantrijeron.

Proses pendidikan politik Dewan Pimpinan Cabang PKS Mantrijeron telah berjalan dengan baik sebagaimana yang menjadi program kerja Struktur DPC PKS Mantrijeron. Evaluasi terhadap kinerja pengurus dalam proses pendidikan politik ini juga telah berjalan secara rutin. Namun dalam pelaksanaannya partisipasi kader baik sebagai pengurus maupun sebagai peserta masih kurang.

B. Saran-saran

Melihat dari kesimpulan tersebut, maka saran untuk ketua Dewan Pimpinan Cabang PKS Mantrijeron supaya memunculkan kader-kader PKS Mantrijeron untuk menjadi tokoh yang cukup dikenal oleh masyarakat. Hal ini agar masyarakat bisa melihat pribadi kader PKS yang ditokohkan sebagai *output* dari proses pendidikan politik.

Hendaknya melakukan perekrutan kader baru secara kontinyu dengan berbagai strategi yang kreatif dan inovatif. Strategi perekrutan yang monoton dalam jangka waktu tertentu akan dilihat oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai sesuatu yang tidak menarik.

C. Kata Penutup

Tiada kata yang lebih indah dari *Al-hamdulillahirabbil 'alamiin* sebagai wujud syukur penulis kepada Allah atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Terselesaikannya penulisan skripsi yang memakan waktu hingga satu tahun dan sempat berhenti oleh keputusan ini penulis rasakan sebagai sebuah prestasi tersendiri. Namun demikian penulis menyadari keterbatasan dalam banyak hal menjadikan hasil penulisan skripsi ini tidak sebagus dari apa yang sebelumnya penulis bayangkan ketika hendak memulai penelitian. Menyadari masih teramat jauh dari sebuah karya ilmiah yang sempurna, maka penulis mohon kritik serta saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat memberi sumbangan tersendiri bagi dunia pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mulkhan, *"Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi kebudayaan dalam dakwah Islam"*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994
- Abu Ahmadidan, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 1991
- Abu Ridha, *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*, Bandung: Syamil, 2002
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai pustaka, 1994
- Emile Durkheim, *Pendidikan Moral*, Terj. Lukas Ginting, judul asli: *Moral Education*, Jakarta: Erlangga, 1990
- Ilyas Hasan, *Para Perintis Zaman Baru*, terj. judul asli, *Pioneers of Islamic Revival*, Bandung: Mizan, 1998
- Jalaluddin dan Abdullah, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003
- Miriam Budiardjo, *"Dasar-dasar Ilmu Politik"*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Mohtar Mas'oe'd dan Colin McAndrews, *"Perbandingan Sistem Politik"*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993
- Muh. Abduh Qodir Abu faris, *Fiqih Politik Hasan Al-Banna*, terj. Odie Al-Faeda, Solo, Media Insani Press, 2003
- Najib Khalid Al 'Amir, *Tarbiyah Rasulullah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Nu'man, farid, *Al-Ikhwan Al-Muslimun: Anugerah Allah yang Terzalimi*, Depok: Pustaka nauka, 2004
- Puis A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Paulo Freire, *"Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan pembebasan"*, terj. Agung Prihantoro yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002
- Sa'id Hawa, *Membina Angkatan Mujahid*, Solo: Intermedia, 2002

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Renike Cipta, 1993

Tim Raudhatul Jannah Kelompok kajian Manhaj Tarbiyah, *Buku 1: Satuan Acara
Pembelajaran*, Jakarta, Tim kerja penyusun kurikulum, 2000



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA